

Laporan Keuangan

2016

Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Penjelasan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Prov Jatim

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

*Latar belakang penyusunan
Laporan Keuangan*

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dinas Kesehatan selaku entitas akuntansi berkewajiban menyusun laporan keuangan untuk digabungkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menginformasikan posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode pelaporan, selain itu juga berfungsi membandingkan realisasi pendapatan dan belanja anggaran yang telah ditetapkan, menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional.

1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

*Maksud dan tujuan penyusunan
Laporan Keuang...*

Maksud penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta hasil-hasil yang telah di capai;
- 3) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi seluruh kebutuhan kasnya,
- 4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan sumber-sumber penerimaan dan pengeluarannya dan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pengalokasian anggaran;
- 5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan dalam periode berjalan.

1.3. Landasan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

*Landasan Hukum penyusunan
Laporan Keuangan: 2016*

- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
 10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/013/2014 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;
 11. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Provinsi Jawa Timur;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Provinsi Jawa Timur;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

*Sistematika Penyusunan
Catatan atas Laporan Keuangan*

1.4. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

1. Pendahuluan.

Memuat penjelasan mengenai Latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan

2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

Ekonomi makro yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan APBD, serta perubahan anggaran yang dilakukan. Kebijakan

Keuangan, mengenai kebijakan keuangan. Indikator pencapaian target kinerja APBD, menyajikan informasi tentang indikator pencapaian target kinerja APBD.

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, memuat realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi dari target kinerja keuangan. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

4. Kebijakan Akuntansi

Entitas pelaporan keuangan daerah, memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, ekuitas, Arus Kas dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual.

6. Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan harus dilandasi dengan asumsi dasar ekonomi makro daerah yang mempertimbangkan makro regional dan nasional. Asumsi dasar tersebut merupakan besaran fundamental yang menjadi acuan dalam meningkatkan perekonomian daerah, selain karena sangat berpengaruh besar dalam menentukan pengambilan kebijakan pengelolaan anggaran daerah yang akan dialokasikan dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan, juga sebagai tindakan penyesuaian terhadap kekuatan dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk dapat mengeliminir berbagai permasalahan krusial di masyarakat melalui prioritas pembangunan yang diimplementasikan kedalam dokumen tahunan. Kesehatan memegang peranan penting dalam penentuan kebijakan ekonomi, dimana kesehatan mempengaruhi kondisi ekonomi, dan sebaliknya ekonomi mempengaruhi kesehatan. Pelayanan kesehatan yang lebih baik akan memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan jika membawa kesehatan yang lebih baik. Status kesehatan penduduk yang baik meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan per kapita dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 1999 dan Undang-undang No 32 Tahun 2004 mengatur menyalakan bahwa sektor kesehatan merupakan sektor yang terdesentralisasi. Salah satu fungsi yang terdesentralisasi adalah fungsi pelayanan, misalnya: rujukan kesehatan, rujukan pemerintah ke swasta atau swasta ke pemerintah terbagi atas tingkatan. Selain fungsi pelayanan kesehatan pemerintah juga mempunyai peran dalam fungsi pendanaan kesehatan diantaranya pemerintah pusat dengan BPJS Kesehatan, sedangkan Pemerintah daerah dengan APBD yaitu dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur TA 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah:

Pendapatan daerah yang ditargetkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 berasal dari penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penjualan produk usaha daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa sewa tanah dan gedung dan bangunan yang

diperoleh dari UPT Matera Medica Batu dan dari Dinas Kesehatan Prov Jatim dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	195.051.000,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	195.051.000,00
3	Retribusi Daerah	120.844.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.844.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00
6	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	60.000.000,00
7	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.207.000,00
8	Pendapatan Sewa Tanah	62.500.000,00
9	Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan	11.707.000,00

b. Belanja Daerah :

Belanja daerah yang dialokasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 45.627.443.600,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 80.615.486.650,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
1	BELANJA DAERAH	126.242.930.250,00
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	45.627.443.600,00
3	Gaji dan Tunjangan	24.468.018.000,00
4	Tambahan Penghasilan PNS	21.155.897.000,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.528.600,00
6	BELANJA LANGSUNG	80.615.486.650,00
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.012.779.650,00
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.795.350.209,00
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.276.208.500,00
10	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	1.073.243.000,00
11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.901.643.849,00
12	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	4.550.000.000,00
13	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.100.000.000,00
14	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.080.000.000,00
15	Program Upaya Kesehatan Perorangan	1.259.550.000,00
16	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	2.260.673.500,00
17	Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan	4.755.412.967,00
18	Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan	40.435.804.522,00
19	Program Pengendalian Penyakit	4.114.820.453,00

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Renstra Tahun 2014-2019 sebagai berikut

Matrik Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016		
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA 2016
A.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
	1. <i>Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (PURI) (%)</i>	13,59%
	2. <i>Persentase Angka Kematian Ibu (%)</i>	91,62%
	3. <i>Persentase Angka Kematian Bayi (%)</i>	8,3%
	4. <i>Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standart (%)</i>	0,52 %
	5. <i>Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standart (%)</i>	25,1%
	6. <i>Persentase Penurunan Kasus Pemasangan (%)</i>	0,8%
	7. <i>Persentase Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)</i>	2,0%
	8. <i>Persentase Balita Stunting (%)</i>	29%
	9. <i>Persentase Penanggulangan KLB Skala Provinsi dalam <48 jam (%)</i>	92%
	10. <i>Persentase Screening PTM Bagi Penduduk Berisiko >15 Tahun secara Kumulasi (%)</i>	1,6%
	11. <i>Persentase Akses Air Minum Berkualitas (%)</i>	82,32%
	12. <i>Persentase Akses Sanitasi Dasar</i>	78,01%
	13. <i>Persentase Sediaan Farmasi Yang Memenuhi Syarat</i>	40%
	14. <i>Persentase Rasio Dokter Spesialis Obygn (%)</i>	1,14%
	15. <i>Persentase Rasio Dokter Spesialis Anak (%)</i>	0,82%
	16. <i>Persentase Rasio Dokter Umum (%)</i>	17,14%
	17. <i>Persentase Rasio Bidan (%)</i>	45,44%
	18. <i>Persentase Rasio Perawat (%)</i>	85,35%
	19. <i>Persentase Rasio Nutrisionis (%)</i>	4,85%
	20. <i>Persentase Kab/Kota yang memiliki District Health Account (DHA)</i>	5%
	21. <i>Persentase Masyarakat Miskin Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</i>	6%
	22. <i>Persentase Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Penggunaan Anggaran Keuangan dan Aset Yang Ditindaklanjuti (%)</i>	100%

3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :

Pendapatan daerah yang ditargetkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 berasal dari penerimaan retribusi pemakaaian kekayaan daerah, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penjualan produk usaha daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa sewa tanah dan gedung dan bangunan yang diperoleh dari UPT Materia Medica Batu dan dari Dinas Kesehatan Prov Jatim dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	195.051.000,00	175.008.436,00	89,72
3	Retribusi Daerah	120.844.000,00	104.625.750,00	86,58
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.844.000,00	21.432.250,00	69,49
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	38.856.500,00	129,52
6	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	60.000.000,00	44.337.000,00	73,90
7	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.207.000,00	70.382.636,00	94,85
8	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan		743.592,00	
9	Pendapatan dari pengembalian		11.057.894,00	
10	Pendapatan Sewa Tanah	62.500.000,00	50.000.000,00	80,00
11	Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan	11.707.000,00	8.581.200,00	73,30

b. Belanja Daerah :

Belanja daerah yang dialokasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 45.627.443.600,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 80.615.486.650,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5

A	BELANJA DAERAH	126.242.930.250,00	112.938.646.303,00	89,46
B	BELANJA TIDAK LANGSUNG	45.627.443.600,00	42.137.229.072,00	92,35
1	Gaji dan Tunjangan	24.468.018.000,00	23.135.263.101,00	94,55
2	Tambahan Penghasilan PNS	21.155.897.000,00	18.998.965.971,00	89,80
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.528.600,00	3.000.000,00	85,02
C	BELANJA LANGSUNG	80.615.486.650,00	70.801.417.231,00	87,83
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.012.779.650,00	2.859.764.836,00	94,92
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.795.350.209,00	7.122.321.262,00	91,37
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.276.208.500,00	2.045.092.039,00	89,85
4	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	1.073.243.000,00	957.302.272,00	89,20
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.901.643.849,00	5.100.440.805,00	86,42
6	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	4.550.000.000,00	3.802.217.960,00	83,57
7	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.100.000.000,00	1.922.216.950,00	91,53
8	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.080.000.000,00	1.066.885.241,00	98,79
9	Program Upaya Kesehatan Perorangan	1.259.550.000,00	1.110.818.316,00	88,19
10	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	2.260.673.500,00	1.904.296.620,00	84,24
11	Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan	4.755.412.967,00	3.799.110.065,00	79,89
12	Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan	40.435.804.522,00	35.402.984.677,00	87,55
13	Program Pengendalian Penyakit	4.114.820.453,00	3.707.966.188,00	90,11

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam hal pelaksanaan terhadap kinerja keuangan APBD TA 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target yang telah direncanakan. Hambatan kinerja keuangan TA 2016 sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah

1. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 21.432.250,00 atau 69,49% dari anggaran sebesar Rp. 30.844.000,00. Tidak tercapainya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dijelaskan bahwa ruang gedung yang dimiliki oleh UPT Materia Medica Batu yang selama ini disewakan untuk pernikahan, saat ini

- ditiadakan dikarenakan harga sewa terlalu murah sedangkan pemeliharaan gedung pasca kegiatan tersebut terlalu berat sedangkan alokasi untuk pemeliharaan tidak mencukupi. Sehingga saat ini ruang gedung hanya disewakan untuk rapat/pertemuan.
2. Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp. 44.337.000,00 atau 73,90% dari anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00. Tidak tercapainya Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah dapat dijelaskan bahwa target P-APBD tahun 2016 terlalu tinggi mengingat waktu hanya 2 (dua) bulan dan terjadi penurunan persediaan bibit tanaman obat karena greenhouse sebagai sarana pembibitan mengalami kerusakan akibat terlanda angin puting beliung.
 3. Rendahnya Harga satuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 15 Tahun 2013 khususnya retribusi jasa usaha sehingga target PAD tidak bisa maksimal

Solusi

1. Perlunya dilakukan revisi Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang tarif yang disesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga dapat meningkatkan PAD
2. Perlunya perbaikan tempat pengembangan bibit tanama obat khususnya untuk Materia Medica sehingga dapat menghasilkan lebih banyak bibit dan dapat dipasarkan kepada masyarakat

Belanja Daerah

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat realisasi hanya terserap 83,57% dikarenakan kegiatan pameran kesehatan dalam kegiatan Pertinas segala pelaksanaan sudah difasilitasi oleh Pusat ;
2. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan hanya terserap 79,89% dikarenakan pengadaan belanja bahan kimia untuk bahan reagen TB, RDT malaria dan RDT leptospirosis tidak dapat diserap dikarenakan setelah dilakukan proses tender sebanyak 2 (dua) kali namun gagal dimana penawar tidak bisa memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan oleh ULP sedangkan waktu pengadan sudah diakhir tahun;
3. Belanja Pelayan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesda) hanya terserap Rp. 33.316.675.790,00 (87,68%) dari total anggaran sebesar Rp. 38.000.000,00 dikarenakan:

- a. Dengan terbitnya Perda No 5 tahun 2016 ttg pencabutan Perda No 4 Tahun 2008 ttg Sistem Jaminan Sosial Nasional Prov Jatim, pelaksanaan Program Jamkesda Prov Jatim kepesertaannya hrs segera beralih ke JKN;
 - b. Pada Periode Oktober – Desember 2016 tercatat 8 Kab/Kota yaitu Kota Surabaya, Kota Kediri, Kota Madiun, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Malang, Kab. Lumajang dan Kab. Ngawi telah mengintegrasikan peserta pemegang kartu jamkesda ke BPJS sehingga dari total 669.623 peserta berkurang menjadi 279.204 jiwa
4. Perencanaan Anggaran dan penyusunan program kegiatan pada APBD/PAPBD masih kurang tepat, utamanya untuk pengadaan barang dan jasa;

Solusi

1. Koordinasi Antara Para Pengelola Keuangan di Lingkungan Dinas Kesehatan lebih ditingkatkan khususnya tentang perencanaan dan pertanggungjawaban sehingga segala permasalahan cepat teratasi;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bimtek, kursus khususnya tentang perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan;
3. Meningkatkan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan tanpa mengesampingkan unsur kehati-hatian;
4. Pada saat penyusunan anggaran belanja agar direncanakan sebaik mungkin sehingga proses efisiensi dapat dilakukan pada saat penyusunan rencana kegiatan di setiap tahun anggarannya.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas akuntansi keuangan daerah

Entitas Akuntansi

Dinas Kesehatan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara periodik dan melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan.

Sebagai entitas akuntansi maka Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terdiri dari :

1. Laporan Realisasi APBD

Laporan Keuangan terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK

Laporan Realisasi APBD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit LRA dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dengan menggunakan basis kas. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan dan ketaatan entitas akuntansi terhadap anggaran.

❖ **Angka realisasi Pendapatan** yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD TA 2016 berdasarkan data penerimaan kas dari Bendahara Penerimaan disetorkan Kas Daerah.

❖ **Angka realisasi Belanja Daerah** yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD TA 2016 yaitu realisasi belanja daerah yang dikelola berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dimana pengguna anggaran bertanggungjawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya.

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan- LO, beban dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya dengan menggunakan basis akrual.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas

akhir.

4. Neraca

Neraca menyediakan informasi posisi keuangan mengenai asset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas akuntansi serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

- ❖ Laporan Realisasi APBD disusun dengan menggunakan **Basis Kas** yaitu bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- ❖ Penyajian laporan operasional, aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca berdasarkan **basis akrual**, yaitu bahwa pendapatan-LO, beban, asset, kewajiban dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- ❖ Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pergub 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Basis akuntansi yang melandasi penyusunan LK.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Unsur-unsur laporan keuangan yang menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari pos-pos yang membentuk laporan keuangan, bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :

Basis Pengukuran yang melandasi penyusunan LK.

Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan ;

Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Kebijakan Akuntansi dalam menyusun Laporan keuangan

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 adalah :

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Kas Daerah

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan **asas bruto yaitu mencatat penerimaan secara bruto**, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran/belanja). Namun, dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai maka asas bruto dikecualikan.

(2) Belanja

Belanja diakui pada saat kas keluar dari Kas Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

(3) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan-LO terbagi dalam 2 kelompok besar yaitu, pendapatan dari kegiatan operasional dan pendapatan dari kegiatan non operasional. Pendapatan operasional diklasifikasikan menjadi 3 yaitu, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan pendapatan dari kegiatan non operasional adalah pendapatan atau keuntungan yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan dengan menggunakan asas bruto yaitu bahwa pendapatan diakui sebesar hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran atas perolehan pendapatan tersebut.

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

(5) Aset

Aset terdiri dari : Aset lancar, Aset Tetap dan Aset lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa akan depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah provinsi Jawa Timur atau oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari Kas dan setara kas, Piutang, Beban dibayar dimuka dan Persediaan

Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas dan setara kas, Piutang, Beban dibayar dimuka dan Persediaan.

Kas dicatat sebesar nilai rupiah

Kas disajikan dineraca dengan menggunakan **nilai nominal** artinya disajikan sebesar nilai rupiah tersebut. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka kas tersebut dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal laporan.

Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai tunai dari saldo kas yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pendapatan namun belum disetorkan Ke Kas Daerah

Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar saldo tunai yaitu selisih antara total SP2D UP/GU/TU dengan pengesahan SPJ dan penyeteroran sisa kas ke Kas Daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran merupakan sisa dana Uang Persediaan (UP) yang sampai akhir tahun masih berada di Bendahara Pengeluaran.

Piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

atau akibat lainnya yang sah. Piutang merupakan hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak /bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD. Semua jenis piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value)-nya. **Piutang atas pendapatan retribusi disajikan sebesar nilai piutang pendapatan denda retribusi dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih.**

Penyisihan piutang retribusi dilakukan berdasarkan skedul umur piutang sebagai berikut:

No	Umur Piutang	% Penyisihan
1	<1 tahun	0,5%
2	1-2 tahun	10%
3	2-3 tahun	50%
4	Lebih dari 3 tahun	100%

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Nilai Net Realizable Value untuk piutang selain piutang pajak, piutang retribusi dan piutang atas pendapatan denda pajak dan retribusi dihitung **sebesar nilai nominal piutang pendapatan dikurangi dengan penghapusan piutang.**

Beban dibayar dimuka dicatat berdasarkan jenis beban dibayar dimuka dan periodisasi pembayaran biaya dibayar dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah merupakan biaya yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional namun belum dinikmati manfaat dari biaya tersebut. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari asset lancar di neraca. Pengungkapan biaya dibayar dimuka di catatan atas laporan keuangan meliputi: Jenis beban dibayar dimuka dan periodisasi pembayaran biaya dibayar dimuka.

Persediaan dicatat dengan metode FIFO

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat secara periodik dengan mengukur pemakaian persediaan yang dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara

saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil stock opname dikalikan per unit dengan **metode FIFO (Fisrt In First Out)**.

c. Aset Tetap

*Aset Tetap terdiri dari :
Tanah, Peralatan dan
Mesin, Gedung dan
Bangunan, . Jalan,
Irigasi dan Jaringan,
aset tetap lainnya,
Kontruksi Dalam
Pengerjaan serta
Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap*

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diakui ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pengeluaran kas untuk memperoleh asset yang penganggarnya melalui belanja modal dan sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan penyimpanan barang dan pengurus barang. Realisasi belanja modal merupakan langkah awal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menambah mutasi aset tetapnya.

Aset tetap diakui setelah aset tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dilakukan ketika realisasi belanja modal telah menyerap anggaran 100%.

Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, kominikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan/keamanan.

Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah

gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

Aset tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga dan aset tetap hewan ternak.

Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan atau jumlah dari penyusutan sejak aset tetap tersebut diperoleh. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Yang termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran Rumah, Tagihan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak berwujud dan Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), menggambarkan yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah provinsi Jawa Timur secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke Kas Daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR), merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk

Aset Lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana Yang dibatasi penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset lain-lain

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/ pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga, merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan /atau hak usaha yang dimiliki (Bangun, Kelola, Serah).

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi : Software komputer, Lesensi dan Franchise, Hak cipta (copyright), paten, goodwill dan hak lainnya, Hak jasa dan operasi.

e. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lain. Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar pemerintah pada akhir tahun anggaran.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Kewajiban jangka pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai jangka pendek jika diharapkan

untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga dan Utang Jangka Pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Terkait dengan kewajiban jangka panjang, jika terjadi kesulitan likuiditas pemerintah dapat melakukan restrukturisasi atau pendanaan kembali terhadap utang-utangnya yang akan jatuh tempo. Apabila hal ini terjadi, entitas pelaporan dapat memasukkan kewajiban jatuh temponya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan ke dalam klasifikasi kewajiban jangka panjang, jika, Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Jumlah kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek menjadi kewajiban jangka panjang

f. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan ekuitas.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Permendagri 13 tahun 2006 telah menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengacu Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar akuntansi Pemerintah

5. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Realisasi Pendapatan TA 2016
Rp. 175.008.436,00

Realisasi Belanja TA 2016
Rp. 112.938.646.303,00

Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

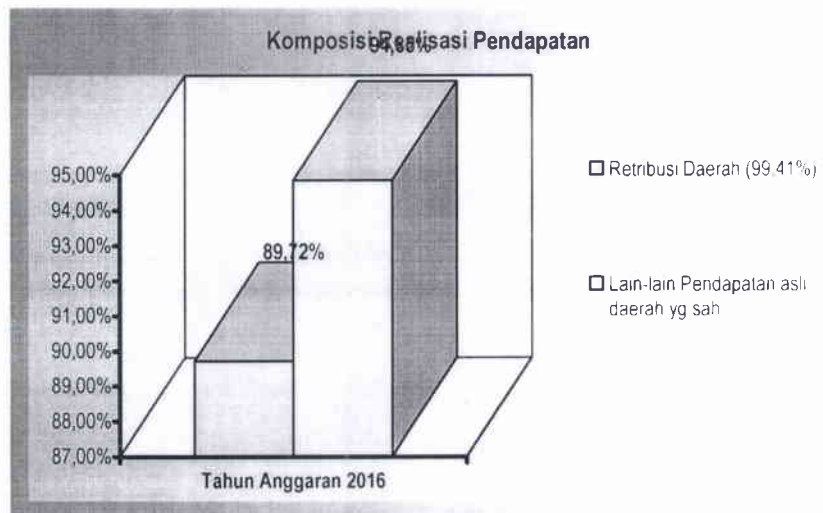
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar Sumber, Alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 175.008.436,00, apabila dihadapkan dengan target pendapatan sebesar Rp. 195.051.000,00 atau terealisasi sebesar 89,72 %. Pendapatan terdiri dari : Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 104.625.750,00, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 70.382.686,00

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 112.938.646.303,00. Apabila Realisasi Belanja dihadapkan pada target belanja sebesar Rp. 126.242.930.250,00 terdapat penghematan atau sebab lainnya sebesar Rp. 13.304.283.947,00 atau terealisasi 89,46 %. Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 42.137.229.072,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 70.801.417.231,00

5.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

Komposisi Realisasi dari seluruh Pendapatan TA 2016



Grafik - 1

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 175.008.436,00 apabila dihadapkan dengan target pendapatan sebesar Rp. 195.051.000,00 atau target sebesar 89,72 %. Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana tabel berikut :

Tabel : (1) Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2016

Realisasi Pendapatan
sebesar Rp.
175.008.436,00

PENDAPATAN LRA	2016			2015
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	195.051.000	175.008.436	89,72	106.242.205
Jumlah Pendapatan LRA	195.051.000	175.008.436	89,72	106.242.205

Pengakuan :

Pendapatan –LRA diakui pada saat:

1)Kas telah masuk ke dalam rekening Kas Umum Daerah;

Pengukuran :

- 1) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan azas bruto, yaitu mencatat penerimaan secara bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran/belanja);
- 2) Pendapatan-LRA diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nominal yang masuk ke kas daerah.

Penjelasan Pos-Pos Pendapatan-LRA

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersumber dari retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH	2016			2015
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
a. Retribusi Daerah	120.844.000	104.625.750	86,58	78.165.500
b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	74.207.000	70.382.686	94,85	28.076.705
Jumlah Pendapatan LRA	195.051.000	175.008.436	89,72	106.242.205

Rincian jenis PAD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Retribusi Daerah Rp. 104.625.750

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda) dengan realisasi selama tahun 2016 sebagai berikut :

PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	2016			2015
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
Retribusi Jasa Usaha	120.844.000	104.625.750	86,58	78.165.500
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.844.000	21.432.250	69,49	20.681.000
b. Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000	38.856.500	129,52	23.985.000
c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	60.000.000	44.337.000	73,90	33.499.500
Jumlah Pendapatan Retribusi	120.844.000	104.625.750	86,58	78.165.500

- a. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 21.432.250,00 atau 69,49% dari anggaran sebesar Rp. 30.844.000,00. Tidak tercapainya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dijelaskan bahwa ruang gedung yang dimiliki oleh UPT Materia Medica Batu yang selama ini disewakan untuk pernikahan, saat ini ditiadakan dikarenakan harga sewa terlalu murah sedangkan pemeliharaan gedung pasca kegiatan tersebut terlalu berat sedangkan alokasi untuk pemeliharaan tidak mencukupi. Sehingga saat ini ruang gedung hanya disewakan untuk rapat/pertemuan.
- b. Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp. 44.337.000,00 atau 73,90% dari anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00. Tidak tercapainya Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah dapat dijelaskan bahwa target P-APBD tahun 2016 terlalu tinggi mengingat waktu hanya 2 (dua) bulan dan terjadi penurunan persediaan bibit tanaman obat karena greenhouse sebagai sarana pembibitan mengalami kerusakan akibat terlanda angin puting beliung.
- c. Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp. 38.856.500,00 atau 129,52% dari anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00. Pendapatan melampaui target dikarenakan tingkat kunjungan masyarakat meningkat ke UPT Materia Medica Batu untuk mengetahui bibit tanaman obat tradisional yang dimiliki dan dapat digunakan untuk pengobatan.

2) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah..... Rp 70.382.686

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Perda, dengan realisasi tahun anggaran 2016 dan tahun 2015 sebagai berikut :

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	2016			2015
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
a. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	743.592	-	2.432.250
b. Pendapatan dari Pengembalian	-	11.057.894	-	2.301.255
c. Pendapatan Sewa	74.207.000	58.581.200	78,94	23.343.200
Jumlah Pendapatan Retribusi	74.207.000	70.382.686	94,85	28.076.705

Pendapatan sewa sebesar Rp. 70.382.686 atau 94,85% dari anggaran sebesar Rp. 74.207.000,00. Tidak tercapainya pendapatan sewa dikarenakan bangunan di Malang yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Prov Jatim yang disewa oleh Bank BRI saat ini tidak diperpanjang lagi dikarenakan saat ini masih dalam proses hibah antara Dinas Kesehatan dengan Kemenkes.

5.1.2 PENJELASAN POS-POS BELANJA

Realisasi Belanja
sebesar
Rp.112.938.646.303,00

Realisasi Belanja pada TA. 2016 sebesar Rp. 112.938.646.303,00 apabila dihadapkan dengan anggaran sebesar Rp.126.242.930.250,00 terealisasi sebesar 89,46% terdapat penghematan belanja atau sebab lainnya sebesar Rp.13.304.283.947,00. Realisasi Belanja meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagaimana tabel berikut :

Tabel : (2) Ikhtisar Realisasi Belanja

BELANJA DAERAH	2016			2015
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
a. Belanja Tidak Langsung	45.627.443.600	42.137.229.072	92,35	28.715.619.501
b. Belanja Langsung	80.615.486.650	70.801.417.231	87,83	84.398.803.429
Jumlah Belanja Daerah	126.242.930.250	112.938.646.303	89,46	113.114.422.930

5.1.2.a BELANJA TIDAK LANGSUNG

Realisasi Belanja Tidak Langsung pada TA 2016 sebesar Rp.42.137.229.072,00 apabila dihadapkan pada dengan anggaran sebesar Rp. 45.627.443.600,00 terealisasi sebesar 92,35% terdapat penghematan belanja sebesar Rp. 3.490.214.528,00. Realisasi belanja tidak langsung meliputi :

BELANJA TIDAK LANGSUNG	2016			2015
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA PEGAWAI	45.627.443.600	42.137.229.072	92,35	28.715.619.501
a. Gaji dan Tunjangan	24.468.018.000	23.135.263.101	94,55	22.716.857.361
b. Tambahan Penghasilan PNS	21.155.897.000	18.998.965.971	89,80	5.996.404.140
c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.528.600	3.000.000	85,02	2.358.000
Jumlah Belanja Daerah	45.627.443.600	42.137.229.072	92,35	28.715.619.501

Pengakuan :

Belanja-LRA diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan potongan).

5.1.2 b. BELANJA LANGSUNG

Realisasi Belanja Langsung pada TA 2016 sebesar Rp.70.801.417.231,00 apabila dihadapkan pada dengan anggaran sebesar Rp. 80.615.486.650,00 terealisasi sebesar 87,83% terdapat penghematan

belanja atau sebab lain sebesar Rp. 9.814.069.419,00. Realisasi belanja langsung meliputi :

BELANJA LANGSUNG	2016			2015
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA LANGSUNG	80.615.486.650	70.801.417.231	87,83	84.398.803.429
a. Belanja Pegawai	3.937.847.000	3.640.039.000	92,44	4.576.776.002
b. Belanja Barang dan Jasa	73.600.342.964	64.303.255.394	87,37	76.491.476.939
c. Belanja Modal	3.077.296.686	2.858.122.837	92,88	3.330.550.488
Jumlah Belanja Langsung	80.615.486.650	70.801.417.231	87,83	84.398.803.429

5.1.2 b.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi **Belanja Pegawai** Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. **3.640.039.000,00** atau **92,44%** dari jumlah yang dianggarkan dalam PAPBD sebesar Rp. 3.937.847.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 936.737.002,00. Berikut rincian belanja Pegawai :

BELANJA LANGSUNG	2016			2015
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA PEGAWAI	3.937.847.000	3.640.039.000	92,44	4.576.776.002
a. Honorarium PNS	2.152.575.000	1.881.488.000	87,41	2.819.372.500
b. Honorarium Non PNS	1.636.545.000	1.626.385.000	99,38	1.510.682.502
c. Uang Lembur	148.727.000	132.166.000	88,86	246.721.000
Jumlah Belanja Pegawai	3.937.847.000	3.640.039.000	92,44	4.576.776.002

Pengakuan :

Belanja-LRA diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan potongan).

5.1.2 b.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Realisasi **Belanja Barang dan Jasa** Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. **64.303.255.394,00** atau **87,37 %** dari jumlah yang dianggarkan dalam PAPBD sebesar Rp. 73.600.342.964,00. Bila dibandingkan dengan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar Rp.12.188.221.545,00. Berikut Rincian Belanja Barang dan Jasa :

BELANJA LANGSUNG	2016			2015
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA BARANG DAN JASA	73.600.342.964	64.303.255.394	87,37	76.491.476.939
a. Belanja Bahan Pakai Habis	1.448.899.927	1.280.888.314	88,40	1.831.864.785
b. Belanja Bahan/ Material	1.721.854.500	1.353.884.442	78,63	4.073.576.375
c. Belanja Jasa	9.155.657.470	8.442.752.904	92,21	7.865.107.100
d. Belanja Premi, Iuran Asuransi dan Pemeriksaan Kesehatan	27.848.650	27.848.650	100,00	0
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	551.620.000	383.063.800	69,44	304.195.400
f. Belanja Cetak dan Penggandaan	1.377.898.449	1.028.330.516	74,63	1.154.754.165
g. Belanja sewa/tanah/jalan/rumah/gedung/gudang/parkir	864.675.000	676.100.000	78,19	299.860.000
h. Belanja sewa sarana mobilitas	98.550.000	32.330.000	32,81	51.714.000
i. Belanja sewa pertengkapan dan peralatan kantor	37.480.000	15.881.500	42,37	950.000
j. Belanja makan dan minuman	2.821.331.680	2.382.408.340	84,44	3.107.717.185
k. Belanja pakaian dan atributnya	265.200.000	234.593.800	88,46	0
l. Belanja pakaian kerja	129.218.000	124.280.000	96,18	183.975.000
m. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.600.000	12.305.800	97,67	15.730.000
n. Belanja perjalanan dinas	13.774.392.615	11.795.361.906	85,63	13.451.281.178
o. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek	34.600.000	1.500.000	4,34	350.400.000
p. Belanja Pemeliharaan	2.871.441.673	2.801.044.532	97,55	4.723.857.120
q. Belanja jasa konsultasi	75.000.000	69.550.000	92,73	70.452.500
r. Belanja kesehatan masyarakat	38.000.000.000	33.316.675.790	87,68	38.613.630.781
s. Uang/barang untuk dibenkan kepada pihak ketiga/masyarakat pemenang perlombaan/kompetisi/kejuaraan	332.075.000	324.455.100	97,71	391.411.350
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	73.600.342.964	64.303.255.394	87,37	76.491.476.939

Pengakuan :

Belanja-LRA diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan potongan).

Rincian penjelasan belanja barang dan jasa sebagai berikut :

1) Realisasi belanja bahan/material sebesar Rp. 1.353.884.442.00 atau

78,63% dari anggaran sebesar Rp. 1.721.854.500,00. Tidak tercapainya realisasi dikarenakan :

- a. belanja bahan kimia terserap sebesar Rp. 445.403.000,00 atau 56,57% dari anggaran sebesar Rp. 787.350.000,00 disebabkan Belanja bahan kimia utk bahan reagen TB RDT malaria dan RDT leptosporosis tdk dpt diserap dikarenakan setelah dilakukan proses tender sebanyak 2 kali namun gagal dikarenakan penawar tdk bisa memenuhi persyaratan yg telah ditentukan ;
 - b. belanja bahan praktek dan percontohan terserap sebesar Rp. 254.500,00 atau 26,87% dari anggaran sebesar Rp. 947.000,00 dikarenakan kegiatan pembahasan draft pergub tindak lanjut bindalwas makanan hanya diserap 1 kali krna telah terbit peraturan ttg pemerintah daerah terkait pembagian kewenangan dlm pengaturan bindalwas makmin.
- 2) Realisasi belanja perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 383.063.800,00 atau 69,44% dari anggaran sebesar Rp. 551.620.000,00 tidak tercapai dikarenakan belanja service kendaraan bermotor terserap sebesar Rp. 311.299.800,00 atau 65,25% dari anggaran sebesar Rp. 477.100.000,00 disebabkan service kendaraan disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang akan dipelihara.
 - 3) Realisasi belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp. 1.028.330.516,00 atau 74,63% dari anggaran sebesar Rp. 1.377.898.449,00 tidak tercapai dikarenakan belanja cetak untu buku KOHORT hanya terealisasi sebesar Rp. 327.558.050,00 atau 59,05% dari anggaran sebesar Rp. 554.734.000,00 dikarenakan berdasarkan hasil lelang lebih rendah dari pagu anggaran dalam DPA
 - 4) Realisasi belanja sewa/tanah/jalan/rumah/gedung/gudang/parkir sebesar Rp. 676.100.000,00 atau 78,19% dari anggaran sebesar Rp. 864.675.000,00 tidak tercapai disebabkan belanja sewa gedung untuk pertemuan forum komunikasi pelaksanaan pembiayaan kesehatan di Prov Jatim yang dilaksanakan di Latkesmas tarifnya lebih rendah dari anggaran dalam DPA, hanya terserap Rp.123.500.000,00 atau 55,98% dari anggaran sebesar Rp. 220.600.000,00.
 - 5) Realisasi belanja sewa sarana mobilitas sebesar Rp. 32.330.000,0 atau 32,81% dari anggaran sebesar Rp. 98.550.000,00. Tidak tercapai

dikarenakan Sewa kendaraan utk pengangkut obat terserap Rp. 1.980.000,00 atau 3,07% dari anggaran Rp. 64.400.000,00 hanya terserap 2 kali dari 23 kali yg dianggarkan karena pengangkutan obat ED ke lokasi pemusnahan sdh masuk dalam akun biaya pengolahan sampah.

- 6) Realisasi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor sebesar Rp. 15.881.500,00 atau 42,37% dari anggaran sebesar Rp. 37.480.000,00 tidak tercapai disebabkan belanja sewa meja kursi, peralatan dan mesin hanya dibelanjakan apabila ada event-event besar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Prov Jatim.
- 7) Realisasi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek sebesar Rp. 1.500.000,00 atau 4,34% dari anggaran sebesar Rp. 34.600.000,00. Tidak tercapai disebabkan belanja kursus berdasarkan undangan dari instansi penyelenggara.

5.1.2 b.3 BELANJA MODAL

Realisasi **Belanja Modal** Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar **Rp. 2.858.122.837,00** atau **92,84 %** dari jumlah yang dianggarkan dalam PAPBD sebesar Rp. 3.077.296.686,00. Bila dibandingkan dengan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar Rp.472.427.651,00. Berikut Rincian Belanja Modal :

BELANJA LANGSUNG	2016			2015
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA MODAL	3.077.296.686	2.858.122.837	92,88	3.330.550.488
a. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	-	-	-	-
b. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	350.000.000	348.120.000	99,46	362.050.000
c. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Tidak Bermotor	3.600.000	3.520.000	97,78	-
d. Belanja Modal Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	12.000.000	9.900.000	82,50	64.685.500
e. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.216.518.524	1.169.543.500	96,14	1.844.210.088
f. Belanja Modal Penghias Ruangan rumah Tangga	134.550.000	125.521.000	93,29	50.765.000
g. Belanja Modal pengadaan Alat-Alat Studio	224.900.000	202.757.500	90,15	128.638.400
h. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	150.000.000	149.600.000	99,73	194.260.000
i. Belanja Modal alat-alat laboratorium	496.000.000	363.715.000	73,33	29.150.000
j. Belanja Modal alat-alat instalasi listrik, telpon dan gas	-	-	-	-
k. Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan	310.228.162	307.354.137	99,07	546.123.000

BELANJA LANGSUNG	2016			2015
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA MODAL	3.077.296.686	2.858.122.837	92,88	3.330.550.488
l. Belanja modal pengadaan buku/kepastakaan	31.000.000	30.361.700	97,94	-
m. Belanja Modal alat-alat olahraga	-	-	-	-
n. Belanja Modal tidak berwujud	148.500.000	147.730.000	99,48	23.677.500
o. Belanja modal alat ukur	-	-	-	14.322.000
p. Belanja modal alat kedokteran	-	-	-	34.870.000
q. Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota	-	-	-	37.799.000
Jumlah Belanja Modal	3.077.296.686	2.858.122.837	92,88	3.330.550.488

Pengakuan :

1. Belanja Modal-LRA diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
2. Belanja Modal-LRA diakui sebagai belanja modal harus memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
 - b. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - c. Diperoleh atau dibangun dengan mkasud untuk digunakan;
 - d. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - e. Tidak mudah rusak dalam bebrapa kali penggunaan;
 - f. Nilainya memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Pengukuran :

1. Belanja diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan potongan);
2. Pengukuran belanja modal menggunakan mata uang rupiah.

5.2. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan
Operasional (LO)

Realisasi
Pendapatan-LO TA
2016 sebesar Rp.
201.215.552.741,30

Realisasi Beban-
LO TA 2016
sebesar Rp.
294.263.174.652,86

Penjelasan Umum Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 201.215.552.741,30,-. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 104.625.750,00, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 201.110.926.991,30.

Realisasi Beban pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 294.263.174.652,86. Beban terdiri dari Beban Operasi Rp.294.263.174.652,86 dan Defisit Kegiatan Non Operasional Rp.101.050.000,00

5.2.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN-LO

Realisasi Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 201.215.552.741,30. Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebagaimana tabel berikut :

PENDAPATAN LO	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah	176.510.209,00	104.158.871,00	72.351.338,00	69,46
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	201.039.042.532,30	93.919.558.005,50	107.119.484.526,80	114,06
Jumlah Pendapatan LO	201.215.552.741,30	94.023.716.876,50	107.191.835.864,80	114,01

Pengakuan :

Pendapatan-LO diakui diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi.

Pengukuran :

Seluruh pendapatan-LO dicatat dengan menggunakan azas bruto
Penjelasan Pendapatan-LO sebagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah	109.893.750,00	78.165.500,00	31.728.250,00	40,59
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	66.616.459,00	25.993.371,00	40.623.088,00	156,28
Jumlah Pendapatan LO	176.510.209,00	104.158.871,00	72.351.338,00	69,46

Rincian Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan	%
Retribusi Jasa Usaha				
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	26.700.250,00	20.681.000,00	6.019.250,00	29,11
b. Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga	38.856.500,00	23.985.000,00	14.871.500,00	62,00
c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	44.337.000,00	33.499.500,00	10.837.500,00	32,35
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	109.893.750,00	78.165.500,00	31.728.250,00	40,59

Retribusi Jasa Usaha mengalami kenaikan 40,59% disebabkan meningkatnya kunjungan masyarakat ke UPT Balai Materia Medica Batu yang dimana disana menyediakan berbagai macam jenis tanaman obat.

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	743.592,00	2.432.250,00	(1.688.658,00)	-69,43
b. Pendapatan dari Pengembalian	-	2.301.255,00	-	0,00
c. Pendapatan Sewa	65.872.867,00	21.259.866,00	44.613.001,00	209,85
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	66.616.459,00	25.993.371,00	42.924.343,00	165,14

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan 165,14% dikarenakan disewakannya tanah milik Dinkes Prov Jatim yang berada dilamongan senilai Rp. 250.000.000,00 selama 3 (tiga) tahun, dimana untuk tahun 2016 senilai Rp. 50.000.000,00

5.2.2 PENJELASAN POS-POS BEBAN

Realisasi Beban pada TA 2016 sebesar Rp. 294.263.174.652,86 Realisasi Beban Operasi meliputi Beban Operasi dan Defisit Kegiatan Non Operasional sebagaimana tabel berikut :

BEBAN OPERASI	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Beban Pegawai	45.777.268.072,00	33.292.162.603,00	12.485.105.469,00	37,50
b. Beban Barang dan Jasa	243.570.863.662,86	121.358.430.659,30	122.212.433.003,56	100,70
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.889.430.243,00	5.122.341.596,00	(232.911.353,00)	4,55
d. Beban Lain-Lain	25.612.675,00	-	-	0,00
Jumlah Beban Operasi	294.263.174.652,86	159.772.934.858,30	134.464.627.119,56	84,16

Pengakuan :

Beban-LO diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan.

Pengukuran :

Seluruh Beban LO dicatat dengan menggunakan azas bruto.

Rincian Belanja Operasi sebagai berikut:

5.2.2.a BEBAN PEGAWAI-LO

BEBAN PEGAWAI	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Gaji dan Tunjangan	23.135.263.101	22.716.857.361	418.405.740,00	1,84
b. Tambahan Penghasilan PNS	18.998.965.971	5.996.404.140	13.002.561.831,00	216,84
c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.000.000	2.358.000	642.000,00	27,23
d. Honorarium PNS	1.881.488.000	2.819.372.500	(937.884.500,00)	-33,27
e. Honorarium Non PNS	1.626.385.000	1.510.682.502	115.702.498,00	7,66
f. Uang Lembur	132.166.000	246.721.000	(114.555.000,00)	-46,43
Jumlah Beban Pegawai	45.777.268.072,00	33.292.395.503,00	12.484.872.569,00	37,50

Belanja Pegawai-LO mengalami kenaikan 37,50% disebabkan adanya belanja tambahan penghasilan PNS sebesar Rp. 13.002.561.831,00. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2016 berdasarkan Peraturan Gubernur setiap pegawai mendapatkan tunjangan prestasi.

Yang rendah diberi penjelasan.....(kebijakan pengetatan)

5.2.2.b BEBAN BARANG JASA-LO

BEBAN BARANG DAN JASA	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Beban Bahan Pakai Habis	10.351.342.391,00	2.110.873.207,50	8.240.469.183,50	390,38
b. Beban Bahan/ Material	171.917.247.338,86	48.832.399.433,80	123.084.847.905,06	252,06
c. Beban Jasa	8.436.385.235,00	7.876.761.016,00	559.624.219,00	7,10
d. Beban Premi, Iuran Asuransi dan Pemeliharaan Kesehatan	27.848.650,00	13.524.073,00	14.324.577,00	106,02
e. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	383.063.800,00	304.195.400,00	78.868.400,00	25,93
f. Beban Cetak dan Penggandaan	1.028.330.516,00	1.160.683.165,00	(132.352.649,00)	-11,40
g. Beban sewa/ tanah/ jalan/ rumah/ gedung/ gudang/ parkir	676.100.000,00	299.860.000,00	376.240.000,00	125,47
h. Beban sewa sarana mobilitas	32.330.000,00	51.714.000,00	(19.384.000,00)	-37,48
i. Beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor	15.881.500,00	950.000,00	14.931.500,00	1571,74
j. Beban makan dan minuman	2.382.408.340,00	3.107.717.185,00	(725.308.845,00)	-23,34
k. Beban pakaian dan atributnya	234.593.800,00	-	0,00	0,00
l. Beban pakaian kerja	124.280.000,00	183.975.000,00	(59.695.000,00)	-32,45
m. Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	12.305.800,00	15.730.000,00	(3.424.200,00)	-21,77
n. Beban perjalanan dinas	11.795.361.906,00	13.451.281.178,00	(1.655.919.272,00)	-12,31
o. Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek	1.500.000,00	350.400.000,00	(348.900.000,00)	-99,57

BEBAN BARANG DAN JASA	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan	%
p. Beban Pemeliharaan	2.801.044.532,00	4.723.857.120,00	(1.922.812.588,00)	-40,70
q. Beban jasa konsultansi	69.550.000,00	70.452.500,00	(902.500,00)	-1,28
r. Beban kesehatan masyarakat	32.956.834.754,00	38.412.646.031,00	(5.455.811.277,00)	-14,20
s. Uang/barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pemenang perlombaan/kompesi/kejuaraan	324.455.100,00	391.411.350,00	(66.956.250,00)	-17,11
Jumlah Beban Barang dan Jasa	243.570.863.662,86	121.358.430.659,30	121.977.839.203,56	100,51

Beban barang dan jasa-LO mengalami kenaikan 100,51% disebabkan :

1. Beban bahan pakai habis mengalami kenaikan sebesar 390,38% disebabkan adanya hibah pemakaian alat kesehatan pakai habis sebesar Rp. 8.423.365.467,00;
2. Beban Bahan/material mengalami kenaikan sebesar 252,06% dikarenakan adanya pemakaian hibah dari pusat bahan obat-obatan sebesar Rp. 160.546.731.236,46;
3. Beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor mengalami kenaikan 1571,74% dikarenakan beban sewa kursi dan peralatan dan mesin meningkat untuk kegiatan peringatan hari kesehatan dan hari nasional.

5.2.2.c BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Beban Penyusutan peralatan dan mesin	3.796.541.704,00	3.944.083.121,00	(147.541.417,00)	-3,74
b. Beban penyusutan gedung dan bangunan	911.964.578,00	923.568.690,00	(11.604.112,00)	-1,26
c. Beban penyusutan jalan, linggasi dan jaringan	13.981.548,00	13.036.566,00	944.982,00	7,25
d. Beban penyusutan aset tetap lainnya	9.700.825,00	19.088.561,00	(9.387.736,00)	-49,18
e. Beban amortisasi	123.776.652,00	138.779.779,00	(15.003.127,00)	-10,81
f. Beban penyusutan aset lain-lain	33.464.936,00	83.784.879,00	(50.319.943,00)	-60,06
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.889.430.243,00	5.122.341.596,00	(232.911.353,00)	-4,55

5.2.2.d BEBAN LAIN-LAIN

BEBAN LAIN-LAIN	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Beban Lain-lain	25.612.675,00	-	25.612.675,00	0,00
Jumlah Beban Lain-lain	25.612.675,00	-	25.612.675,00	0,00

Beban lain-lain merupakan beban atas aset tetap tidak masuk kapitalisasi sebagai aset tetap, sehingga dialihkan ke aset ekstrakomptabel.

5.2.3 PENJELASAN DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit kegiatan non operasional pada tahun 2016 sebesar Rp. 101.050.000,00 merupakan defisit pemindahtanganan/pemusnahan aset non lancar yang diperoleh dari kerugian penjualan aset lain-lain sesuai dengan berita acara penghapusan barang inventaris berupa kendaraan bermotor Nomor 188/24/KPTS/013/2016 tanggal 12 Januari 2016

NO	URAIAN	JUMLAH
1	ASET LAIN-LAIN YANG DIHAPUS	407.100.000
2	AK.PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	(407.100.000)
3	PENJUALAN	(101.050.000)
JUMLAH DEFISIT PEMINDAHTANGANAN/PEMUSNAHAN ASET NON LANCAR		(101.050.000)

5.3. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Posisi Keuangan secara Umum

Posisi Neraca
secara Umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut
(dalam rupiah) :

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015 (Audited)
Aset	269.919.267.699,53	250.612.099.322,09
Aset Lancar	98.876.294.467,53	73.749.367.409,09
Aset Tetap	174.151.103.350,00	175.984.395.629,00
Aset Lainnya	891.869.882,00	878.336.284,00
Kewajiban	2.282.787.899,00	2.702.693.381,00
Kewajiban Jk. Pendek	2.282.787.899,00	2.702.693.381,00
Ekuitas	267.636.479.800,53	247.909.405.941,09

5.3.1 ASET

5.3.1.a ASET LANCAR

5.3.1.a.1. Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
pengeluaran Rp.0

Jumlah Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar **Rp.0,00** dan **Rp. 46.405.100,00**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	46.405.100,00

Kas di Bendahara Pengeluaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada tanggal 31 Desember 2016 kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00 dimana bendahara pengeluaran telah menyetorkan semua sisa dana UP sebesar Rp. 135.619.015,00 ke rekening Kasda Prov Jatim. Adapun setoran dan rekening koran bendahara pengeluaran sebagaimana lampiran

5.3.1.a.2 Kas Bendahara Penerimaan

Kas Bendahara
Penerimaan
sebesar Rp. 0,00

Jumlah Rekening Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar **Rp.0,00** dan **Rp. 0,00**

URAIAN	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Kas Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

5.3.1b. Piutang Pendapatan

Piutang
Pendapatan
Rp.5.268.000,00

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.268.000,00	0,00

Piutang pendapatan sebesar Rp. 5.268.000,00 merupakan piutang retribusi jasa usaha dimana PT. Bank Jatim Surabaya belum membayar sewa tanah dan bangunan serta ATM selama 3 bulan (Oktober 2016- Desember 2016). Piutang ini tidak disisihkan karena telah diterima kasnya pada tanggal 24 Januari 2017

Beban Dibayar
Dimuka Rp.0,00

5.3.1.c Beban Di Bayar Dimuka

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban dibayar dimuka-Premi,iuran, asuransi dan pemeriksaan kesehatan	0,00	0,00

5.3.1.d Persediaan

Persediaan Rp.
73.702.962.309,09

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Persediaan	94.871.026.467,53	73.702.962.309,09

Jumlah tersebut merupakan persediaan yang digudang pakai habis dan di gudang obat yang belum habis terpakai. Rincian Persediaan sebagai berikut :

Jenis Persediaan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Alat Tulis Kantor	122.868.515,00	174.861.225,00
Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis	0,00	583.000,00
Alat Kesehatan Pakai Habis	5.937.388.589,00	3.020.395.826,00
Perlengkapan laboratorium habis pakai	995.300.250,00	530.622.600,00
Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman	743.327,75	22.026.980,75
Bahan Obat-obatan	72.918.548.340,88	62.449.034.224,34
Bahan Kimia	14.890.094.444,90	7.499.355.453,00
Cetak dan Penggandaan	6.083.000,00	6.083.000,00

Kondisi barang Persediaan Non Medis dalam keadaan baik dan dipergunakan untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Persediaan Medis merupakan buffer stock Dinas yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI dalam bentuk hibah untuk diberikan ke Kab/Kota. Rincian Persediaan terlampir (...)

Aset Tetap Rp.
174.151.103.350,00

5.3.2 Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp.174.151.103.350,00 dan Rp. 175.984.395.629,00 merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca Dinas Kesehatan Prov.Jatim. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (Acquisition Cost) dan memperhitungkan Depresiasi (penyusutan).

Aset Tetap	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	Rp	174.151.103.350,00	Rp	175.984.395.629,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp.) :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Tanah	130.113.500.000,00	130.113.500.000,00
Peralatan dan Mesin	45.270.510.959,00	43.694.221.763,00
Gedung dan Bangunan	41.213.905.512,00	40.906.551.375,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	462.643.722,00	462.643.722,00
Aset Tetap lainnya	216.263.622,00	190.394.597,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan	43.125.720.465,00	39.382.915.828,00
JUMLAH	174.151.103.350,00	175.984.395.629,00

Tanah sebesar
Rp.130.113.500.000,00

5.3.2.a Tanah

Tanah	31 Desember 2015		31 Desember 2014	
	Rp	130.113.500.000,00	Rp	130.113.500.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Tidak terdapat mutasi tanah

5.3.2.b Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin sebesar Rp.
45.270.510.959,00

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	Rp	45.270.510.959,00	Rp	43.694.221.763,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 yang

digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Rincian Peralatan dan Mesin berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1.	Alat-alat Besar	1.574.019.250,00	1.574.019.250,00
2.	Alat-alat Angkutan	5.226.064.000,00	5.053.524.000,00
3.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	598.048.473,00	1.013.983.473,00
4.	Alat-alat Pertanian	1.489.396.760,00	1.479.496.760,00
5.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga.	16.197.742.725,00	15.088.896.629,00
6.	Alat-alat Studio dan Komunikasi	2.939.400.497,00	2.590.547.397,00
7.	Alat-alat Kedokteran	3.015.593.602,00	3.024.473.602,00
8.	Alat Laboratorium	14.230.245.652,00	13.869.280.652,00
9.	Alat Persenjataan	0,00	0,00
JUMLAH		45.270.510.959,00	43.694.221.763,00

Perubahan nilai Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin TA 2016 disebabkan oleh :

No.	Uraian	Berkurang	Bertambah
1.	Alat-alat Berat	0,00	0,00
2.	Alat-alat Angkutan	179.100.000,00	351.640.000,00
3.	Alat-alat Bengkel	415.935.000,00	0,00
4.	Alat-alat Pertanian	0,00	9.900.000,00
5.	Alat-alat Kantor dan RT.	386.584.204,00	1.513.800.300,00
6.	Alat-alat Studio dan Komunikasi	21.930.000,00	370.783.100,00
7.	Alat-alat Kedokteran	8.880.000,00	0,00
8.	Alat Laboratorium	0,00	363.715.000,00
9.	Alat Persenjataan	0,00	0,00
JUMLAH		1.033.549.204,00	2.609.838.400,00

Perubahan nilai Peralatan dan Mesin disebabkan oleh :

1. Penambahan sebesar Rp. 2.609.838.400,00 dengan perincian sebagaimana dalam lampiran
2. Pengurangan sebesar Rp. 1.033.549.204,00 berasal dari:
 - a. Pemindahbukuan dari Pos Aktiva Tetap ke Pos Aset Lain-Lain sebesar Rp. 1.012.429.204,00 terhadap barang-barang yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik karena barang dimaksud

dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan sebagaimana dalam lampiran....

- b. Pengalihan dari Pos Aktiva Tetap ke Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp. 25.612.675,00 dikarenakan tidak memenuhi kapitalisasi dalam aset. Adapun data sebagaimana dalam lampiran

5.3.2.c Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan sebesar
Rp.
41.213.905.512,00.

		31 Desember 2016	31 Desember 2015
Gedung dan bangunan	Rp	41.213.905.512,00	Rp 40.906.551.375,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Rincian Gedung dan Bangunan berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1.	Bangunan Gedung	41.213.905.512,00	40.906.551.375,00
2.	Bangunan Monumen	0,00	0,00
JUMLAH		41.213.905.512,00	41.213.905.512,00

Perubahan nilai Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan TA 2016 diakibatkan oleh :

No.	Uraian	Berkurang	Bertambah
1.	Bangunan Gedung	0,00	307.354.137,00
2.	Bangunan Monumen	0,00	0,00
JUMLAH		0,00,00	307.354.137,00

Perubahan nilai Gedung dan Bangunan disebabkan oleh:

Penambahan sebesar Rp. 307.354.137,00 dengan perincian :

- a. Realisasi belanja modal gedung tempat kerja sebesar Rp. 307.354.137,00 TA 2016 yaitu untuk pekerjaan penerangan jalan kantor Dinas, pembuatan taman dan pembuatan pagar kantor dinas sisi selatan.

5.3.2.d Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan , irigasi dan
jaringan sebesar
Rp.
462.643.722,00

		31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jalan, irigasi dan Jaringan	Rp	462.643.722,00	Rp 462.643.722,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 yang

digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

5.3.2.e Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya
sebesar
Rp.216.263.622,00

	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
Aset Tetap lainnya	Rp	216.263.622,00	Rp	190.394.597,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Rincian Aset Tetap Lainnya berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1.	Buku dan Perpustakaan	210.343.622,00	184.474.597,00
2.	Barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan	5.920.000,00	5.920.000,00
3.	Hewan/Ternak dan Tanaman		0,00
JUMLAH		216.263.622,00	190.394.597,00

Perubahan nilai aset tetap lainnya TA 2016 disebabkan :

No.	Uraian	Berkurang	Bertambah
1.	Buku dan Perpustakaan	4.492.675,00	30.361.700,00
2.	Barang bercorak kesenian/kebudayaan	0,00	0,00
JUMLAH		4.492.675,00	30.361.700,00

Perubahan nilai Peralatan dan Mesin disebabkan oleh :

1. Penambahan sebesar Rp. 30.361.700,00 adalah pembelian buku untuk pendukung kegiatan di Perpustakaan Dinkes dan Balai Materia Medica Batu
2. Pengurangan sebesar Rp.4.492.675,00 berasal dari:
 - a. Pengalihan dari Pos Aktiva Aktiva Tetap ke Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp. 4.492.675,00 dikarenakan tidak memenuhi kapitalisasi dalam aset. Adapun data sebagaimana dalam lampiran

5.3.2.f Konstruksi dalam Pengerjaan

KDP sebesar
Rp.0,00

	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	0,00	Rp	0,00

5.3.2.g. Akumulasi Penyusutan

Ak.Penyusutan

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Akumulasi Penyusutan	(43.125.720.465,00)	(39.382.915.828,00)

sebesar Rp
(43.125.720.465,00)

Rincian Akumulasi Penyusutan sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1.	Ak.Penyusutan Peralatan dan Mesin	(33.309.874.671,00)	(30.502.716.985,00)
2.	Ak.Penyusutan Gedung dan Bangunan	(9.551.443.374,00)	(8.639.478.796,00)
3.	Ak.Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(64.306.998,00)	(50.325.450,00)
4.	Ak.Penyusutan Golongan Aset Tetap Lainnya	(200.095.422,00)	(190.394.597,00)
JUMLAH		(43.125.720.465,00)	(39.382.915.828,00)

Perubahan akumulasi penyusutan disebabkan :

No.	Uraian	Berkurang	Bertambah
1.	Ak.Penyusutan Peralatan dan Mesin	989.384.018,00	3.796.541.704,00
2.	Ak.Penyusutan Gedung dan Bangunan		911.964.578,00
3.	Ak.Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		13.981.548,00
4.	Ak.Penyusutan Golongan Aset Tetap Lainnya		9.700.825,00
JUMLAH		989.384.018,00	4.732.188.655,00

5.3.3 ASET LAINNYA

Aset Lainnya
sebesar Rp.
1.916.676.320,00

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Aset lainnya	1.066.757.778,00	878.336.284,00

Jumlah tersebut merupakan aset lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1	Aset Tak Berwujud	1.412.546.500,00	1.264.816.500,00
2	Ak.Amortisasi ATB	(776.717.580,00)	(652.940.928,00)
3	Aset Lain-lain	1.257.189.024,00	651.859.820,00
4	Ak.peny.aset lain-lain	(826.260.166,00)	(385.399.108,00)
JUMLAH		1.066.757.778,00	878.336.284,00

Perubahan nilai Aset lainnya diakibatkan oleh :

No	Uraian	Berkurang	Bertambah
1	Peralatan dan Mesin	407.100.000,00	1.012.429.204,00
JUMLAH		407.100.000,00	1.012.429.204,00

Perubahan Aset Lainnya disebabkan oleh :

1. Penambahan sebesar Rp. 1.012.429.204,00 adalah aset tetap berupa peralatan dan mesin yang diusulkan akan dihapuskan.
2. Pengurangan sebesar Rp.407.100,00 berasal dari:
 - a. Penghapusan alat-angkutan berdasarkan berita acara Nomor: 188/24/KPTS/013/2016 tanggal 12 Januari 2016

5.3.4. KEWAJIBAN

		31 Desember 2016	31 Desember 2015
<i>Kewajiban sebesar Rp. 2.282.787.899,00</i>	Kewajiban Jangka Pendek	Rp 2.282.787.899,00 Rp	2.702.693.381,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Per 31 Desember 2016 dan Per 31 Desember 2015

Rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut :

5.3.4.a. Pendapatan Diterima Di Muka

	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
<i>Pendapatan diterima di muka sebesar Rp. 0,00</i>	Pendapatan Diterima Di Muka	0,00	7.291.667,00

5.3.4.b Utang Belanja

	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
<i>Utang belanja sebesar Rp. 2.282.787.899,00</i>	Utang Belanja	2.282.787.899,00	2.695.401.714,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016. Rincian utang belanja sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1	Utang Belanja Pegawai	0,00	2.105.100,00
2	Utang Belanja Jasa	2.282.787.899,00	2.693.296.614,00
JUMLAH		2.282.787.899,00	2.695.401.714,00

Utang belanja sebesar Rp. 2.282.787.899 adalah merupakan :

1. Utang belanja listrik, telpon dan air bulan Desember 2016 senilai Rp. 91.113.912,00
2. Utang Belanja Kesehatan Masyarakat yang klaimnya Per tanggal 6 Desember s/d 31 Desember 2016 senilai Rp.2.191.673.987,00

5.3.5.EKUITAS

	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
<i>Ekuitas sebesar Rp. 267.811.367.696,53</i>	Ekuitas	267.811.367.696,53	247.909.405.941,09
	Jumlah tersebut merupakan Ekuitas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Per 31 Desember 2016 dan Per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :		

Ekuitas	201.505.401.621,41	201.336.944.609,41
Surplus/Defisit - LO	-159.351.549.344,36	-66.422.466.220,80
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	225.657.515.419,48	112.994.927.552,48
JUMLAH EKUITAS	267.811.367.696,53	247.909.405.941,09

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan operasional dengan laporan perubahan ekuitas memiliki keterkaitan melalui surplus/defisit laporan operasional. Surplus dan defisit dihasilkan dari selisih antara pendapatan-LO dan beban. Secara bersamaan surplus dan defisit akan berpengaruh terhadap saldo ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo Ekuitas Akhir seharusnya sama dengan Ekuitas di Neraca.

Berikut Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

NO	URAIAN	2016	2015
1	EKUITAS AWAL	247.909.405.941,09	247.909.405.941,09
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	-92.929.083.123,56	0,00
3	EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	112.662.587.867,00	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / PENYESUAIAN EKUITAS	168.457.012,00	0,00
5	EKUITAS AKHIR	267.811.367.696,53	247.909.405.941,09

1. Ekuitas awal

Jumlah ekuitas awal 2016 senilai Rp. 247.909.405.941,09 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2015

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO Dinas Kesehatan Prov Jatim pada tahun 2016 adalah defisit sebesar Rp.92.929.083.123,56 yang diperoleh dari pendapatan-LO dikurangi dengan beban-LO :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PENDAPATAN-LO	201.215.552.741,30
2	BEBAN -LO	294.245.685.864,86
3	DEFISIT PEMINDAH TANGANAN/PEMUSNAHAN ASET NON LANCAR	(101.050.000)
	SURPLUS/DEFISIT LO	(92.929.083.123,56)

3. Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan senilai Rp.112.662.587.867,00 yang merupakan saldo akhir R/K PPKD tahun 2016. Pos RK/PPKD ini timbul sebagai konsekuensi dari Struktur Pemerintah Daerah yang menggunakan akuntansi Pusat-Cabang. Hal ini dikarenakan SKPD tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemerintah Daerah melalui mekanisme transfer.

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Penyesuaian Ekuitas

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/penyesuaian ekuitas adalah dampak yang timbul pada laporan keuangan akibat adanya perubahan kebijakan. Adapun perubahan sebagai berikut :

URAIAN	2016	2015
Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan / Penyesuaian Ekuitas	168.457.012,00	-
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain 2015	157399108,00	-
Koreksi Utang Air 2015	10,00	-
Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Belanja - LO	11057894,00	-
Ekuitas	168.457.012,00	-

6. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Jawa Timur yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesehatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Kesehatan
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Dinas Kesehatan 2014-2019 adalah: "***Masyarakat Jawa Timur lebih Mandiri untuk Hidup Sehat***"

Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara jelas menggambarkan visi Dinas Kesehatan yang menjadi cita-cita upaya kesehatan dan menguraikan upaya-upaya yang akan di lakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Misi tersebut adalah:

1. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat
2. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
3. Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
4. Mendayagunakan sumber daya kesehatan
5. Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur :

Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan misi kesatu yaitu "Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat", maka tujuan yang ingin dicapai adalah **"Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat"**.
2. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu "Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau", maka tujuan yang ingin dicapai adalah **"Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat"**.
3. Dalam mewujudkan misi ketiga yaitu "Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan" maka tujuan yang ingin dicapai adalah **"Optimalisasi penanggulangan masalah gizi"** dan **"Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana"** serta **"Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat"**.
4. Dalam mewujudkan misi keempat yaitu "Mendayagunakan sumber daya kesehatan", maka tujuan yang ingin dicapai adalah **"Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan"** dan **"Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya kesehatan"** dan **"Pembiayaan Kesehatan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil"**.
5. Dalam mewujudkan misi kelima yaitu "Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih", maka tujuan yang ingin dicapai adalah **"Optimalisasi manajemen kesehatan untuk menunjang program kesehatan"**.

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan tujuan " *Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat* " maka ditetapkan sasaran **"Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat"** dengan indikator: -Persentase Desa Siaga Aktif PURI.

2. Dalam mewujudkan tujuan “ *Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat*” maka ditetapkan sasaran “***Meningkatnya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat***” dengan indikator:
 - a. Angka Kematian Ibu (AKI)
 - b. Angka Kematian Bayi (AKB)
 - c. Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar
 - d. Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar
 - e. Persentase Penurunan Kasus Pemasangan
3. Dalam mewujudkan tujuan “*Optimalisasi penanggulangan masalah gizi*” maka ditetapkan sasaran “***Meningkatnya Penanggulangan masalah gizi yang optimal***” dengan indikator:
 - a. Persentase Balita Gizi Buruk.
 - b. Persentase Balita *Stunting*
4. Dalam mewujudkan tujuan “*Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana*”, maka ditetapkan sasaran “***Meningkatnya Upaya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana***” dengan indikator:
 - a. Persentase penanggulangan KLB skala provinsi dalam <48 jam
 - b. Persentase *screening* PTM bagi penduduk berisiko usia >15 tahun secara kumulasi
5. Dalam mewujudkan tujuan “*Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat*” maka ditetapkan sasaran “***Meningkatnya Akses pada lingkungan yang sehat***” dengan indikator:
 - a. Persentase akses air minum berkualitas
 - b. Persentase akses sanitasi dasar (jamban sehat)
6. Dalam mewujudkan tujuan “*Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes, dan makanan*”, maka ditetapkan sasaran “***Meningkatnya sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman***” dengan indikator: Presentase sediaan farmasi, yang memenuhi syarat.
7. Dalam mewujudkan tujuan “*Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya kesehatan dan kecukupan pembiayaan kesehatan*”, maka ditetapkan sasaran “***Terwujudnya Sumber daya kesehatan yang memadai,***

proporsional, dan handal dengan indikator rasio tenaga kesehatan strategis terhadap jumlah penduduk yaitu:

- a. Rasio Dokter Spesialis Anak
 - b. Rasio Dokter spesialis Obgyn
 - c. Rasio Dokter Umum
 - d. Rasio Bidan
 - e. Rasio Perawat
 - f. Rasio Nutrisionis
8. Dalam mewujudkan tujuan "*Pembiayaan Kesehatan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil*", maka ditetapkan sasaran "***Meningkatnya pembiayaan kesehatan***" dengan indikator: Persentase kecukupan pembiayaan kesehatan sesuai standar.
9. Dalam mewujudkan tujuan "*Optimalisasi kesehatan untuk menunjang program kesehatan*", maka ditetapkan sasaran "***Terwujudnya Tertib administrasi dan manajemen keuangan , aset , perencanaan dan evaluasi***", dengan indikator: Persentase Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penggunaan Anggaran keuangan dan aset yang ditindaklanjuti.

7. PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2016 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun yang berakhir 31 Desember 2016, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.